

DAMPAK SOCIAL DISTANCING TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI BENTENG VASTENBURG SURAKARTA (ANALISIS TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL)

Novel Adryan Purnomo

Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret (UNS)

noveladryan@student.uns.ac.id

Abstrak

Kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah untuk menangani Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk menghindari keramaian. Berlakunya kebijakan ini tentu menyeluruh bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja. Pedagang Kaki Lima (PKL) ikut terdampak dari kebijakan *social distancing* ini. Di satu sisi pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk menghindari penyebaran virus. Dan di sisi lain para PKL harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Perbedaan tujuan ini akan dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural dan menghasilkan analisis dari sistem tindakan dari struktur kebijakan *social distancing* ini. Dari analisis ini ditemukan fakta bahwa sistem-sistem tindakan tidak dapat menjalankan fungsi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, *Latency* dengan baik. Maka dari itulah terjadi permasalahan di dalamnya.

Kata Kunci : Pembatasan Sosial, Dampak Covid-19, PKL, Fungsionalisme Struktural

Abstract

A social distension or physical chipe policy implemented by the Indonesian government is step in dealing with the corona virus disease pandemic (covid-19). These policies require people to avoid the crowds. The impact of this policy is certainly universal for indonesians, including workers. Street hawkers are affected by the social distangling policies. On the one hand, governments should implement policies to avoid the spread of the virus. And on the other hand, the PKL had to work to provide for the family. The differences in objectives were studied by qualitative methods and analyzed using structural functionality theories and produced analysis from the action systems of the structure of this social distancing policy. From this analysis, the fact is that the action systems could not administer navigational functions, goals were bulletproof, alternating, latency. That's what the problem is.

Keyword: Social Distancing, Covid-19's Impact, PKL, Structural Functionalism.

Dampak *Social Distancing* terhadap Pedagang Kaki Lima di Benteng Vastenburg Surakarta
(Analisis Teori Fungsionalisme Struktural)

Pendahuluan

Pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembatasan kemungkinan interaksi berupa *social distancing* dan pembatasan aktivitas di pusat-pusat keramaian (Herdiana, 2020:93; Zentrato, 2020:242). Bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah juga mempengaruhi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bekerja dengan mengandalkan konsumen di ruang publik (Hayat, 2016:63). Kebijakan dan larangan untuk berjualan diterapkan untuk PKL sebagai salah satu pelaksanaan dari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Sebagai struktur bawah dalam sistem sosial tersebut, maka PKL harus menaati peraturan yang ada. Namun, hal ini memunculkan sebuah permasalahan karena terjadi ketidakseimbangan antara kebijakan yang dibuat struktur atas dengan kebutuhan PKL di struktur bawah.

Para PKL memiliki sudut pandang berbeda dengan pembuat kebijakan

karena orientasi mereka pada tujuan pemenuhan kebutuhan keluarga mereka sendiri. Di Bandung, pemerintah telah menghimbau para PKL untuk tidak berjualan namun mereka tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Permata, 2020). Dari fenomena tersebut, dapat diartikan adanya perbedaan tujuan yang dimaksudkan tadi. Fenomena ini menjadi menarik dikarenakan perbedaan tujuan jelas tidak mencerminkan adanya tatanan kebijakan yang baik.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali sebuah fakta dari pernyataan para PKL terkait kebijakan tersebut. Dengan menggunakan analisis akan dipahami proses pembentukan sampai dengan penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Adanya ketimpangan tujuan antara PKL dengan pemerintah menandakan adanya sebuah permasalahan dari kebijakan ini. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan strategi studi kasus pada PKL di Benteng Vastenburg Surakarta untuk menemukan adanya permasalahan serupa di lingkup daerah yang lain. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta juga telah mengeluarkan kebijakan turunan atas maklumat Polri tersebut

berupa Surat Edaran Walikota Surakarta nomor: 510/726 tentang perpanjangan pembatasan jam operasional tempat hiburan, pusat kuliner, gedung pertemuan, dan hotel yang merupakan kelanjutan dari surat edaran pembatasan sebelumnya. Hal ini menandakan sangat mungkin terjadi permasalahan di Bandung tadi juga terjadi di wilayah Kota Surakarta termasuk juga PKL di Benteng Vastenburg sebagai salah satu penerima kebijakan Pemkot Surakarta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap adanya permasalahan tersebut dan berusaha membantu penyempurnaan kebijakan pembatasan jam operasional kerja ini dari sudut pandang sosiologi.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah sepanjang *city walk* di areal Benteng Vastenburg. Tempat ini dipilih karena strategi penelitian ini adalah studi kasus tentang PKL yang ada di daerah ini. Data dalam penelitian ini diambil dari data lapangan berupa data primer yang berasal dari pernyataan PKL di Benteng Vastenburg menggunakan pertanyaan wawancara. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian ini

adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara biasa dengan menggunakan instrumen wawancara yaitu *interview guide*. *Interview guide* meliputi daftar pertanyaan, kertas, alat tulis, dan alat rekam yang digunakan sepenuhnya dalam proses wawancara terhadap narasumber. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah dua PKL di Benteng Vastenburg Surakarta. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teknik. Penyajian data dilakukan dengan teknik taksonomi.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surakarta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PKL Benteng Vastenburg. Secara struktur, pemerintah Kota Surakarta dan PKL Benteng Vastenburg tergabung dalam sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, keduanya menduduki struktur sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Struktur-struktur tersebut memiliki status dan peran tersendiri. Terdapat status dan peran yang dijalankan baik PKL maupun pemerintah. Sistem dalam kelompok ini terdiri dari beberapa

struktur antara lain Pemerintah Kota Surakarta, Paguyuban PKL Benteng Vastenburg dan Satpol PP. Pemerintah dalam struktur ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dipserindag) yang memegang peran sebagai pembuat kebijakan. Namun, kebijakan yang dikeluarkan tidak berhubungan dengan pencegahan Covid-19. Hal ini dikarenakan Disperindag (Dinas Perindustrian dan perdagangan) hanya bertugas untuk mengambil uang kebersihan bagi para PKL. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan Pencegahan Covid-19 adalah berkaitan dengan himbuan *social distancing* yang diterapkan oleh Satpol PP yang terdiri dari TNI dan Polri. Peran dari status Satpol PP adalah untuk mengontrol praktik kerja PKL agar sesuai dengan peraturan *social distancing* yaitu menjaga jarak fisik sekitar 1-2 meter. Selain itu, kebijakan lain juga dipastikan diterapkan oleh PKI antara lain memakai masker dan larangan *nongkrong* bagi pembeli. Dari penjelasan ini, maka secara tidak langsung kegiatan berdagang sebenarnya sangat dibatasi. Hal ini dikarenakan kegiatan berdagang mengharuskan kontak antara penjual dan pembeli. Kontak ini dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan *social distancing* tersebut.

Selain Satpol PP, status lainnya adalah Ketua Paguyuban PKL Benteng Vastenburg yaitu Pak Walet. Struktur ini menjadi pemimpin bagi PKL yang ada di Benteng Vastenburg sebagai kelompok paguyuban. Dalam penerapan kebijakan *social distancing*, status ini tidak terlalu memegang peran yang berpengaruh. Namun, pengaruh yang diberikan dari status ini adalah izin dagang bagi para PKL. Izin dagang sebagai legalisasi PKL Benteng Vastenburg sangat berpengaruh bagi keberlanjutan sistem. Jika izin tidak diberikan maka pedagang tidak bisa berjualan. Namun, struktur Kepala Paguyuban PKL Benteng Vastenburg justru memberikan peluang yang besar untuk pelaksanaan kegiatan dagang. Ketua paguyuban mengizinkan para pedagang untuk tetap berjualan dan izin ini dijadikan PKL sebagai alasan yang kuat bagi mereka untuk tetap berdagang. Dari sinilah muncul pertentangan antarstruktur dalam sistem ini. Alasan izin dari Ketua Paguyuban membuat PKL tetap merasa aman untuk berdagang di Benteng Vastenburg saat kebijakan *social distancing* diterapkan.

Dari analisis sistem behavioral, Paguyuban PKL Benteng Vastenburg dapat dilihat sebagai sebuah sistem organisasi behavioral. Paguyuban ini

adalah pemegang fungsi kelola bagi para PKL di Benteng Vastenburg. Artinya, para PKL disatukan ke dalam sebuah organisasi yang bernama Paguyuban PKL Benteng Vastenburg. Fungsi adaptasi yang dijalankan oleh organisasi behavioral dalam menanggapi kebijakan *social distancing* tidak berjalan sama sekali. Tidak ada langkah atau aktivitas khusus yang dibuat dalam lingkup paguyuban untuk menyikapi kebijakan ini. Selain paguyuban, organisasi behavioral juga terbentuk antara PKL dengan Pemerintah Kota Surakarta. Seperti yang dikatakan oleh informan bahwa dulu pernah dilakukan negosiasi pada permasalahan izin berdagang mereka di Benteng Vastenburg. Dan pada akhirnya Pemerintah Kota Surakarta memberikan solusi dan akhirnya mereka diperbolehkan untuk berjualan di Benteng Vastenburg yang kemudian dikelola organisasi behavioral yang kedua yaitu Paguyuban PKL Benteng Vastenburg. Fungsi adaptasi pada organisasi behavioral antara PKL dengan pemerintah berjalan di awal izin PKL untuk bekerja di Benteng Vastenburg. Dan pada kebijakan *social distancing* ini fungsi adaptasi juga berjalan karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan bagi PKL yaitu larangan nongkrong dan harus

berjualan menggunakan masker. Namun, di sini terdapat permasalahan dari pembentukan organisasi behavioral itu sendiri. Dikarenakan PKL sudah memiliki wadah berupa paguyuban, maka hadirnya kedua organisasi behavioral ini sedikit rancu dalam menjalankan fungsi adaptasi. Seperti yang telah disampaikan oleh informan bahwa fungsi kelola tempat dagang telah dijadikan titik aman bagi mereka dan bukan kebijakan dari pemerintah.

Berdasarkan analisis sistem kepribadian, para PKL juga tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pencapaian tujuan. Berdasarkan data, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan para PKL berbeda. Tujuan PKL adalah untuk mendapatkan untung sama dengan keadaan sebelum berlakunya kebijakan *social distancing*. Namun bagi pemerintah tujuan utamanya adalah untuk tercapainya tujuan dari *social distancing* ini. Seperti yang dikatakan informan bahwa tidak ada sokongan ataupun bantuan dari pemerintah untuk membantu PKL mencapai tujuan mereka yaitu pencukupan kebutuhan dari keluarga mereka.

Berdasarkan analisis sistem sosial, fungsi integrasi untuk menyatukan tujuan-tujuan dari struktur ini belum berjalan baik. Dapat dilihat dari

pernyataan narasumber bahwa tujuan yang mereka inginkan untuk tetap mendapatkan untung terhambat oleh tujuan pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan *social distancing*. Seperti data yang menunjukkan bahwa kebijakan seperti larangan mudik yang kemudian menyita pembeli dari dagangan mereka. Hal ini kemudian menyebabkan tujuan mereka sulit tercapai. Hal utama yang diinginkan oleh PKL adalah kebebasan untuk berjualan tanpa adanya larangan. Berdasarkan informan, PKL sebenarnya juga memahami tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pemberlakuan kebijakan *social distancing* tersebut. Namun, karena tujuan tersebut justru berlawanan dengan tujuan mereka maka sistem sosial tidak berjalan dengan maksimal. Sebenarnya sistem sosial ini pernah berjalan baik pada saat PKL melakukan negosiasi dengan Pemkot Surakarta di awal perizinan tempat kerja. Saat itu Pemkot berhasil menjalankan fungsi sosial di dalam organisasi behavioral ini sehingga tercapai sebuah solusi berupa pemberian tempat kerja di Benteng Vastenburg. Namun dalam konteks *social distancing* ini sistem sosial untuk melakukan integrasi tujuan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis sistem

kultural, fungsi latensi tetap berjalan namun mengalami adanya kendala. Berdasarkan pernyataan narasumber bahwa pemerintah yang diwakili oleh Satpol PP selalu rutin melakukan *controlling* di atas jam 9 malam. *Controlling* ini dilakukan dalam bentuk himbauan memakai masker dan mengusir pembeli yang melanggar peraturan larangan nongkrong. Karena kerutinan tersebut berarti terjadi pemeliharaan norma dari pemerintah untuk para PKL. Namun munculnya kendala dalam pemeliharaan norma dari pemerintah ini karena perbedaan tujuan dan tidak berjalannya sistem sosial dengan baik. Contohnya seperti yang disampaikan oleh informan bahwa informan masih memperbolehkan pembeli untuk makan di tempat. Begitu pula informan menjelaskan bahwa pembeli juga sering sembunyi-sembunyi dan menghindari *controlling* dari Satpol PP dan akan kembali ketika proses kontrol sudah selesai. Ini mengartikan pemerintah sebenarnya telah menjalankan fungsi latensi namun keberjalanannya terdapat ketidaksesuaian dan munculnya karena permasalahan sistem sosial.

Simpulan

Berdasarkan analisis teori fungsionalisme struktural dari data penelitian dapat ditemukan struktur

penerapan kebijakan *social distancing* terhadap PKL ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kekacauan organisasi behavioral yang ada, perbedaan tujuan pada sistem sosial, dan tidak maksimalnya fungsi integrasi dan latensi pada sistem sosial dan kultural. Kekacauan organisasi behavioral ini jelas memberikan rancu kepada struktur-struktur yang ada di dalamnya karena kemudian berpengaruh terhadap fungsi dan sistem yang lainnya. Tujuan dari struktur PKL dan pemerintah berbeda karena organisasi behavioral mereka juga tidak jelas. Karena ketidakjelasan tujuan antarstruktur maka sistem sosial sulit untuk dilakukan. Integrasi dari tujuan yang berbeda-beda berdasarkan data hanya dilakukan dalam upaya menghindari larangan bagi penjual padahal PKL juga mengalami penurunan pendapatan yang mengartikan fungsi pencapaian tujuan mereka tidak maksimal. Hal ini pun berpengaruh kepada berjalannya sistem kultural. Pemeliharaan norma dari pemerintah untuk kebijakan *social distancing* tidak sepenuhnya sesuai karena kembali pada tujuan PKL yang berbeda dengan tujuan pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah membantu

penulis dalam proses perencanaan, penelitian, penulisan hingga artikel ini dapat terbit serta kepada tim redaksi Jurnal Dimensia Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY yang telah mempublikasikan karya ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka

Adelia Permata. 2020. "Dampak dari Pandemi Covid-19 bagi Pedagang Kaki Lima". <https://www.kompasiana.com/adeliapermatap3382/5e989315097f3612d60b6b82/dampak-dari-pandemik-covid-19-bagi-pedagang-kaki-lima>. Diunduh pada 13 Mei 2020.

Dian Herdiana, 2020, "Social Distancing: Indonesian Policy Reponse to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Volume 17, No 1, 93.

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-

- 19) Muhammad Hayat 2016, "Strategi Bertahan Hidup Pedagang Kaki Lima (PKL)", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No 2, 63.
- Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor: 510/726 Tentang Perpanjangan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel Dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surakarta.
- Walsyukurniat Zendrato, 2020, "Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19", *Jurnal Education and development*, Volume 8, No 2, 242.